



2025

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TRIWULAN I

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN
PANGANDARAN**



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL TRIWULAN I TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN**

Parigi, 08 April 2025
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Hi. IPUY PURWATI S.Pd., M.Pd.

[Redacted]

Mengetahui,
Kepala Dinas



IAJA NURULHUDA, ST., M. Dev. Plg.

[Redacted]

2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga Tersusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran”.

Karena penulis mempunyai keterbatasan pengetahuan, serta menemukan hambatan dalam menyelesaikan laporan ini, namun atas dorongan motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan Pelaksanaan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulisan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dalam penyusunan Pelaksanaan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini masih banyak kekurangan. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran dimasa yang akan datang.

Parigi, 08 April 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 1

 1.3 Dasar Hukum..... 1

BAB II PEMBAHASAN 3

 2.1 Pengawasan Penanaman Modal 3

 2.2 Simstem Pengawasan Penanaman Modal..... 5

 2.3 Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal Januari-Maret..... 6

BAB III PENUTUP 7

 3.1 Simpulan..... 7

DAFTAR LAMPIRAN

- Rencana Pengawasan
- BAP Pengawasan
- Dokumentasi Pengawasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, Pelaku usaha merupakan orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu maka dengan berdirinya perusahaan yang menanamkan modalnya perlu melengkapi legalitas usahanya

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perlunya dilakukan pengawasan yang merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Laporan Pengawasan ini sebagai bahan evaluasi dalam upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perziinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
7. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8. Peraturan BKPM Nomr 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
9. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Pangandaran, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Bupati di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara terpadu, sehingga mempunyai arti penting bagi unit kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terdapat pada pasal 1 angka 1 bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam penanaman modal terdapat suatu Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Pengendalian dan Sistem Informasi dapat kita ketahui sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) Bahwa Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Pengendalian dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan kinerja dan penyiapan bahan-bahan Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, Pengendalian serta Informasi Penanaman Modal Pasal 8 Ayat (2) dalam melaksanakan merencanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Pengendalian dan Sistem Informasi dan sesuai dengan ayat (3) untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dengan

melaksanakan peningkatan Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dapat adanya penyusun dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.

Pelaksanaan Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan yang telah ditentukan .

Sistem pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan dalam standar atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal atau kewajiban kemitraan.

dalam sistem pengawasan yaitu inpeksi lapangan dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pengawasan ini merupakan upaya dalam memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal atau kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha.

Hasil inspeksi lapangan dan hasil Pengawasan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:

- a. kepatuhan perusahaan yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha;
- b. kepatuhan administratif Pelaku Usaha dalam Melaporkan Kegiatan Usahnya yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi
- c. Berita acara pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan inpeksi lapangan
- d. Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 SISTEM PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

a. Perencanaan Inspeksi Lapangan

Perencanaan Inspeksi Lapangan dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan peraturan frekuensi pelaksanaan Inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha

b. Perangkat kerja pengawasan

Perangkat kerja pengawasan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran memuat profil perusahaan, informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terdapat pada format berita acara pemeriksaan (BAP), surat tugas inspeksi lapangan,

c. Laporan Berkala Pelaku Usaha

Dalam hasil pengawasan Perizinan Berusaha diwajibkan bagi pelaku usaha disampaikan kepada pemerintah daerah melalui sistem OSS

d. Pembinaan dan Sanksi

Dalam hasil pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukan adanya ketidaksesuaian/Kepatuhan pelaku usaha dan ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa pembinaan, perbaikan dan atau penerapan sanksi yang di input kedalam sistem OSS

e. Penilaian Kepatuhan Perusahaan

Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan pelaku usaha memuat kepatuhan teknis pemenuhan persyaratan perizinan, pemenuhan penyampaian laporan secara berkala, penyerapan tenaga kerja indonesia dan pemenuhan persyaratan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga

f. Pelaksanaan Pengaduan

Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan dalam hal pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3 PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PERIODE JANUARI-MARET TAHUN 2025

Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan cara inspeksi lapangan dengan tujuan untuk memantau perkembangan perusahaan, legalitas usaha yang dimiliki setiap perusahaan dan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya periode Juli-September ini dilakukan kepada pelaku usaha menengah dan besar yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk dokumen pendukung pelaksanaan pengawasan berupa Berita acara pemeriksaan yang didalamnya terdapat keterangan perusahaan, legalitas perusahaan, kewajiban perusahaan, dan kepatuhan perusahaan. Untuk kepatuhan perusahaan dengan skala usaha Menengah dan Besar melaporkan realisasi kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Sistem OSS (Online Single Submission) bukti pendukung (terlampir)

RENCANA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Terbit Oss	nama_proyek	Uraian Skala Usaha	Alamat Usaha	Kab Kota Usaha	kecamatan_usaha	Kbli	Judul Kbli	Nomor Telp	Jumlah Investasi	TKI
1	HOTEL CENTURY	04/01/2019	Hotel Century	Usaha Mikro	Jl. Bulak Laut No 86	Kab. Pangandaran	Pangandaran	55120	Hotel Melati	82119583811	3.390.000.000	12
2	PALMA NUGRAHA NUSANTARA	15/05/2019	Hotel Grand Palma	Usaha Menengah	Jl. Pantai barat No.91	Kab. Pangandaran	Pangandaran	55110	Hotel Bintang	081323633606	37.844.125.014	52
3	PANTAI INDAH PANGANDARAN	10/03/2019	Pantai Indah Timur / 55110 - Hotel Bintang	Usaha Besar	Jalan Kidang Pananjung No 151	Kab. Pangandaran	Pangandaran	55110	Hotel Bintang	0265639004	5.479.400.000	94
4	LAUT BIRU	06/12/2018	CV Laut Biru Resort Hotel	Usaha Besar	Jalan E. Jaga Lautan No.17-18	Kab. Pangandaran	Pangandaran	55110	Hotel Bintang	0265639360	63.246.535.956	84
5	TRIJAYA PERMANA SEJATI	08/08/2019	PANGANDARAN INTEGRATED CITY	Usaha Besar	Jalan Bulak Laut	Kab. Pangandaran	Pangandaran	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	081321238302	1.730.581.250.000	16
6	CITRA SUHANDI WIRANDANU	28/02/2019	CITRA ASRI PANGANDARAN	Usaha Besar	Dusun Kedungrejo RT 002 RW 004	Kab. Pangandaran	Pangandaran	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	082129788081	4.900.000.000	15
7	ARTHA JAYA PANGANDARAN	18/01/2019	Perumahan Graha Artha Pajaten tahap 7	Usaha Besar	Dusun Nengkok RT.003 RT.009	Kab. Pangandaran	Sidamulih	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	085200852032	3.624.000.000	32
8	PANCAJAYA MAKMUR BERSAMA	12/07/2019	RUKO SANUR	Usaha Besar	Dusun Kedung Rejo RT.003 RW.003	Kab. Pangandaran	Pangandaran	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	0265630567	7.690.000.000	3
9	PRANS JAYA ABADI	22/09/2022	GARDEN CITY CIBENDA	Usaha Menengah	Dusun Budiasih RT 002 RW RW 020	Kab. Pangandaran	Parigi	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	082118545100	6.281.400.000	5
10	MABANO PROPERTI GRUP	23/06/2020	Purbahayu Hill Pangandaran	Usaha Besar	Jalan Desa Purbahayu RT 002 RW 001	Kab. Pangandaran	Pangandaran	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	082341193376	7.700.000.000	40

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Nomor: 800.1179 / DmpPSP / 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	PT. Mabano Properti Grup
2.	Alamat Lokasi Proyek	Jl. Kp Kalenwaru Rt. 006/Rw. 001 Ds. Sukamanah. Ds. Purbahayu Kec. Pangandaran
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Ineu Susanti

II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI
OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	0220200602536 23 Juni 2020
2.	Nomor Kode Proyek	20231011117581725853
3.	Kegiatan Usaha	GB111
4.	Bidang Usaha	Real Estat yg dimiliki sendiri atau disewa.
5.	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha*)	- SPPL - PBG
6.	Sertifikat Standar/Izin*)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No. Tanggal
8.	Pemenuhan Standar Usaha*)	a. PBG : SK - PBG - 32864-26122022-001 b. 26-12-2022 c. d. e.

9.	Pemenuhan Standar Produk*)	a. Standar: b. Sertifikasi: c. Lisensi: d. Pendaftaran Barang: e. lain-lain:										
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: b. Nilai Rencana Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidaksesuai)*										
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : 10 orang Perempuan: ... orang Total: 10 orang										
12.	Kewajiban *)	<table><tr><td></td><td>Divestasi</td></tr><tr><td></td><td>Pelatihan TKI</td></tr><tr><td>✓</td><td>CSRKemitraan</td></tr><tr><td></td><td>Alih Teknologi</td></tr><tr><td></td><td>Pengelolaan Lingkungan</td></tr></table>		Divestasi		Pelatihan TKI	✓	CSRKemitraan		Alih Teknologi		Pengelolaan Lingkungan
	Divestasi											
	Pelatihan TKI											
✓	CSRKemitraan											
	Alih Teknologi											
	Pengelolaan Lingkungan											
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:										

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui
Pimpinan/Penanggun
jawab Perusahaan

Koordinator DPMPTSP

Tanda Tangan



Nama : Indah Setiani

Nik :

Email : mabano-properthgrupe@gmail.com

Jabatan : Admin finance

1. Nama : Ipu Puwadi
Jabatan : PKPM Ahli Madya

2. Nama : Ijan Holisan
Jabatan : PKPM Ahli Madya

3. Nama : Sopian Wardah Azizah
Jabatan : staf

4. Nama : Bagas Pratama
Jabatan : staf

5. Nama : Robi Soherman
Jabatan : staf

6. Nama :
Jabatan :

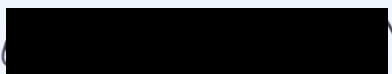


**BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL**

Nomor: 800/56a/DPMPTSP/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	PT. Palma Anugrah Sejahtera
2.	Alamat Lokasi Proyek	Jl. Pantai Barat Rt. 002/Rw. 001 Ds. Pangandaran Kec. Pang- andaran
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Bd. Angga Muhammad Mudz awir 

**II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI
OBJEK PENGAWASAN**

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	<u>1505241</u> 11 Des <u>8120019251819</u> 2020
2.	Nomor Kode Proyek	
3.	Kegiatan Usaha	55110 - Hotel Bintang
4.	Bidang Usaha	Hotel Bintang
5.	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha*)	-IMB/PPG -KKPR
6.	Sertifikat Standar/Izin*)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No. Tanggal
8.	Pemenuhan Standar Usaha*)	a. <u>1223/LHU-A/LAB/VI/2024</u> b. <u>IMB : 503/IMB/342/DPMPTSP/2019</u> c. <u>600/KPTS-209/Bid. PR. PPLH-DPMK/2017</u> d. <u>503/135/15/IL/DPMPTSP/2020</u> e. <u>1352/2017/LHU-A/LAB/VI/2023</u>

9.	Pemenuhan Standar Produk*)	a. Standar: b. Sertifikasi: SLF-SIA/SLF-321809-1106 c. Lisensi: d. Pendaftaran Barang: e. lain-lain:										
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: b. Nilai Rencana Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidaksesuai)*										
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : 28.. orang Perempuan: 10 orang Total: 48 orang										
12.	Kewajiban *)	<table><tr><td></td><td>Divestasi</td></tr><tr><td></td><td>Pelatihan TKI</td></tr><tr><td></td><td>CSR Kemitraan</td></tr><tr><td>✓</td><td>Alih Teknologi</td></tr><tr><td></td><td>Pengelolaan Lingkungan</td></tr></table>		Divestasi		Pelatihan TKI		CSR Kemitraan	✓	Alih Teknologi		Pengelolaan Lingkungan
	Divestasi											
	Pelatihan TKI											
	CSR Kemitraan											
✓	Alih Teknologi											
	Pengelolaan Lingkungan											
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:										

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

o SLD untuk lingkungan	
------------------------	--

IV. HASIL PENGAWASAN

kemitraan dengan bafit dahon . perusahaan mulai operasional 25 juli 2024 . kemitraan belum MOU dan belum UKPM

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui
Pimpinan/Penanggun
jawab Perusahaan



Nama :

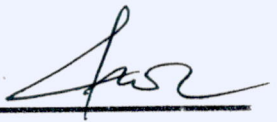
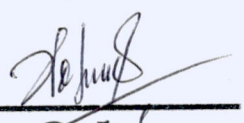
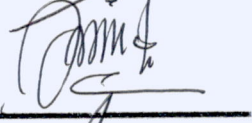
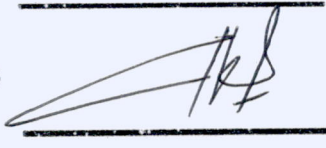
Nik :

Email :

Jabatan :

Koordinator DPMPTSP

Tanda Tangan

1. Nama : Ipu Y Purwadi
Jabatan : PKPM Ahli Keady 
2. Nama : Ijah Hotijah, S.IP
Jabatan : PKPM Ahli Muda 
3. Nama : Sofiah Wardah A
Jabatan : Staf 
4. Nama : Bagas Pratama
Jabatan : Staf 
5. Nama : Novi Tri Hartoyo
Jabatan : Staf 
6. Nama :
Jabatan :

FORMAT PROFIL PELAKU USAHA YANG DILAKUKAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DPMPTSP KABUPATEN PANGANDARAN

Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2025

Nama Perusahaan	:	
Nama Pelaku Usaha	:	PT. PALMA ANUGRAH SEJAHTERA
No.Telpon	:	085 321 6 26 575
NIB dan Tanggal	:	28 Mei 2024
Sertifikat Standar	:	
Legalitas Usaha Lainnya	:	1223/LHU-A/LAB/VI/2024 - 503/IMB/342/DPMPTSP/2019 - 503/135/IS/IL/DPMPTSP/2020 - 1352/LHU-A/LAB/VII/2023 - 514/SLF-321809-11062024-001
Jenis Perseroan	:	
Jenis Penanaman Modal	:	
Skala Badan Usaha	:	
Status Badan Usaha	:	
NPWP	:	
Lokasi Proyek	:	Jl. Pantai Barzok Rt-002 Rw-001 Desa. Pangandaran kec. Pangandaran
Bidang Usaha	:	Restoran - 56101 Hotel Bintang -
Rencana Investasi	:	
Realisasi Investasi	:	
Tenaga Kerja	:	L = 38 P = 10
Luas Area	:	2.570.30 M2
Alamat Email	:	
Rencana Produksi	:	
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi	:	
Dokumentasi	:	



BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Nomor: 800 / 84 / DPmPSP / 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 13 bulan Maret tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	PT. Trijaya Permana Segati
2.	Alamat Lokasi Proyek	Jalan Parapat Nomor 99, Dusun Parapat, Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Asep

II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI
OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	9120108860488 08 - Agustus - 2025
2.	Nomor Kode Proyek	202110-1815-2208-8697-329
3.	Kegiatan Usaha	68111 - Real Estat yang dimi- liki Sendiri atau disewa
4.	Bidang Usaha	Realestat yang dimiliki Sendiri atau di sewa
5.	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha*)	- SPPL - PBG/IMB - UKL-LIPL - SLF - KKPR
6.	Sertifikat Standar/Izin*)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No. Tanggal
8.	Pemenuhan Standar Usaha*)	a..... b..... c..... d..... e.....

9.	Pemenuhan Standar Produk*)	a. Standar: b. Sertifikasi: c. Lisensi: d. Pendaftaran Barang: e. lain-lain:	
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Rp. 1.730.581.250.000 b. Nilai Rencana Investasi: Rp. 25.819.341.000 c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidaksesuai)*	
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : 16 orang Perempuan: ... orang Total: 16 orang	
12.	Kewajiban *)	☐ Divestasi ☐ Pelatihan TKI ☐ CSRKemitraan ☐ Alih Teknologi ☐ Pengelolaan Lingkungan	
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:	

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

Perusahaan telah memiliki legalitas usaha

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui
Pimpinan/Penanggun
gJawab Perusahaan

Koordinator DPMPTSP

Tanda Tangan



Nama : Asep Delphin
Nik :
Email :
Jabatan : Legal

1. Nama : Hj- Ipuy Purwati, S.Pd., M.Pd
Jabatan : PKPM Ahli Madya

2. Nama : Ijah Hotijah, S.IP
Jabatan : PKPM Ahli Muda

3. Nama : Enay Irmayanti, S.IP., M.M
Jabatan : Kasubag Umpeg

4. Nama : Ayi Angani, S.E
Jabatan : Fungsional Umum

5. Nama : Novi Tri Hartoyo, S.IP
Jabatan : Staf

6. Nama : Bagus Pratama, S.H
Jabatan : Staf



